

Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Pada SMA Negeri 1 Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatra Utara

Implementation of the Independent Learning Program Policy at SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, Labuhan Batu Utara Regency, North Sumatra Province

Hendrik Siahaan & Nina Angelia*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 12 Maret 2025; Direview: 28 Maret 2025; Disetujui: 03 April 2025

*Corresponding Email: ninaangelia@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan siswa telah berjalan dengan baik, mendukung pemahaman kebijakan ini di tingkat sekolah. Guru memiliki motivasi tinggi dalam menerapkan metode pengajaran yang lebih fleksibel, tetapi tantangan muncul dari kesiapan siswa dalam belajar mandiri. Selain itu, kendala utama dalam implementasi Merdeka Belajar adalah keterbatasan fasilitas teknologi, akses internet, serta kurangnya sistem evaluasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam penyediaan sarana digital, pelatihan guru, serta penguatan mekanisme evaluasi agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.

Keywords: Implementasi; Kurikulum; Pendidikan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Freedom of Learning policy at SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, Labuhan Batu Utara Regency, using the George Edward III policy implementation theory approach, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that communication between principals, teachers, and students has been going well, supporting the understanding of this policy at the school level. Teachers are highly motivated to implement more flexible teaching methods, but challenges arise from students' readiness to learn independently. In addition, the main obstacles in the implementation of Merdeka Learning are limited technological facilities, internet access, and lack of an effective evaluation system. Therefore, further support is needed from the government in providing digital facilities, teacher training, and strengthening the evaluation mechanism so that this policy can be implemented optimally and sustainably.

Keywords: Implementation; Curriculum; Education.

How to Cite: Siahaan, H., & Angelia, A. (2025). Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Pada SMA Negeri 1 Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatra Utara. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS)*. 7(4); 1335-1341



PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam mencerdaskan generasi muda agar mampu mengembangkan potensi diri, berpikir kritis, serta memiliki karakter yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan berpikir kreatif, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan (Rohman & Ningsih, 2018; Suryaningsih & Nurlita, 2021). Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya reformasi dalam sistem pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih fleksibel, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah program Merdeka Belajar, yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya untuk memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih mandiri dan sesuai dengan karakteristik masing-masing (Abidah et al., 2020; Ilmawan, 2024a; Yunaini et al., 2022).

Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang berfokus pada pemberian otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan, termasuk fleksibilitas dalam metode pembelajaran, penilaian, serta pengelolaan kurikulum (Bhakti et al., 2022; Lase et al., 2022). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih inklusif, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, serta menekankan pada esensi belajar yang lebih mendalam tanpa dibebani oleh standar ketuntasan yang kaku. Kebijakan ini juga mendukung pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, di mana siswa diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan sosial yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat (Ilmawan, 2024b; Lase et al., 2022; Lubis et al., 2022).

Namun, dalam implementasinya, Merdeka Belajar menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari segi fasilitas, kompetensi guru, kesiapan peserta didik, maupun dukungan dari lingkungan sekitar. SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, sebagai salah satu sekolah negeri di Kabupaten Labuhanbatu Utara, juga menerapkan kebijakan Merdeka Belajar. Namun, sejauh mana kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih dalam.

Sejak diterapkannya Merdeka Belajar, SMA Negeri 1 Kualuh Hulu berupaya untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Guru diberikan kebebasan dalam menentukan metode pengajaran yang paling efektif, sementara siswa didorong untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini meliputi kesiapan guru dalam merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, kesiapan siswa dalam belajar secara mandiri, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti teknologi dan bahan ajar yang sesuai.

Salah satu aspek penting dalam implementasi Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu adalah bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap metode pengajaran yang diterapkan oleh guru. Dalam pendekatan konvensional, pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru (teacher-centered learning), di mana siswa cenderung menjadi penerima informasi secara pasif. Dengan diterapkannya Merdeka Belajar, paradigma ini mulai bergeser menuju pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif (student-centered learning). Guru diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka secara mandiri melalui diskusi, proyek, serta pemecahan masalah berbasis dunia nyata (Inayati et al., 2023; Ningtyas, 2023).

Namun, perubahan ini tidak mudah diterapkan tanpa adanya peningkatan kompetensi guru. Salah satu tantangan utama dalam implementasi Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu adalah kesiapan tenaga pendidik dalam merancang dan mengelola pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Beberapa guru mungkin masih terbiasa dengan metode pengajaran konvensional, sehingga diperlukan pelatihan yang lebih intensif agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan konsep Merdeka Belajar. Pelatihan berbasis teknologi pendidikan dan pendekatan



pedagogi modern menjadi hal yang sangat diperlukan agar guru mampu mengoptimalkan proses pembelajaran (Anwar, 2020; Musfah, 2012; Werdiningsih, 2021).

Merdeka Belajar menuntut siswa untuk lebih mandiri dalam mencari sumber belajar, aktif dalam diskusi, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Namun, tidak semua siswa memiliki motivasi dan kesiapan untuk belajar secara mandiri, karena masih terbiasa dengan sistem pembelajaran berbasis instruksi guru (Haqkiki et al., 2022; Khairat, 2016; Sinaga & Zainnudin, 2013). Selain itu, keberhasilan implementasi Merdeka Belajar juga bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital untuk akses materi, evaluasi, dan komunikasi antara guru dan siswa. Kendala seperti akses internet yang terbatas, kurangnya perangkat teknologi, serta minimnya bahan ajar digital masih menjadi tantangan di beberapa sekolah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih efektif serta dukungan infrastruktur pendidikan dari pemerintah agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di mana kebanyakan studi lebih banyak menyoroti konsep dan prinsip dasar Merdeka Belajar secara umum, tanpa meninjau implementasi spesifik di sekolah tertentu. Beberapa penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teori kebijakan pendidikan, sementara penelitian ini akan menganalisis langsung bagaimana kebijakan Merdeka Belajar diimplementasikan di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, dengan melihat faktor-faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dengan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali fakta yang terjadi di lapangan, memahami pengalaman partisipan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penerapan kebijakan ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan siswa guna memahami bagaimana kebijakan Merdeka Belajar diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Observasi langsung dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana metode pengajaran diterapkan dalam konteks Merdeka Belajar serta bagaimana siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi sekolah, termasuk kebijakan pendidikan, kurikulum, dan laporan akademik yang mendukung analisis penelitian.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik, yang mencakup pengumpulan, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data guna mengidentifikasi pola yang muncul. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tema utama seperti metode pengajaran, tantangan implementasi, dan dampak kebijakan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan informasi dari berbagai partisipan serta menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan member check untuk mengonfirmasi hasil wawancara dengan partisipan serta audit trail guna menjaga transparansi penelitian dan memastikan data dapat diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan salah satu reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Kebijakan ini diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan harapan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inovatif, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di SMA Negeri 1 Kualuh



Hulu, kebijakan Merdeka Belajar mulai diterapkan pada September 2021 sebagai bagian dari program nasional.

Namun, dalam implementasinya, setiap sekolah memiliki tantangan dan hambatan yang berbeda, tergantung pada kesiapan sumber daya, kebijakan internal sekolah, serta kondisi sosial-ekonomi siswa dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana kebijakan ini berjalan di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III (1984), yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Joko Widodo, 2021).

1. Komunikasi dalam Implementasi Merdeka Belajar

Komunikasi yang efektif menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, komunikasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan pihak terkait harus berjalan dengan baik agar kebijakan Merdeka Belajar dapat dipahami dan diterapkan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara, SMA Negeri 1 Kualuh Hulu telah menjalankan komunikasi yang baik antara pemangku kebijakan di sekolah, sehingga semua pihak memahami tujuan dan implementasi kebijakan ini. Kepala sekolah telah mengadakan berbagai sosialisasi dan pelatihan bagi guru untuk memahami konsep Merdeka Belajar dan bagaimana mengaplikasikannya dalam metode pengajaran mereka.

Namun, meskipun komunikasi di tingkat guru dan kepala sekolah berjalan baik, tantangan masih ditemukan dalam komunikasi dengan siswa. Beberapa siswa menyatakan bahwa mereka kurang memahami konsep Merdeka Belajar, terutama bagaimana mereka harus belajar secara lebih mandiri tanpa terlalu bergantung pada instruksi langsung dari guru. Banyak dari mereka masih terbiasa dengan sistem pembelajaran konvensional yang lebih terstruktur, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pola pembelajaran yang lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada strategi komunikasi yang lebih intensif dalam membimbing siswa untuk memahami dan beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru.

Selain itu, berdasarkan teori George Edward III, komunikasi yang tidak efektif atau kurang tersampaikan dengan baik dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan pemahaman kepada siswa, seperti melalui workshop, program mentoring, atau pembimbingan akademik untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan pola belajar yang lebih mandiri.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Merdeka Belajar

Sumber daya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah memiliki sumber daya manusia (guru) yang cukup kompeten dalam mengajar dan mengelola pembelajaran. Mayoritas guru telah mendapatkan pelatihan mengenai Merdeka Belajar, sehingga mereka dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan konsep yang lebih fleksibel dan inovatif.

Namun, tantangan utama dalam aspek sumber daya adalah kurangnya fasilitas pendukung, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar menekankan pentingnya teknologi sebagai alat bantu utama, tetapi di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, keterbatasan akses internet, perangkat komputer, serta bahan ajar digital masih menjadi kendala yang signifikan. Beberapa guru mengalami kesulitan dalam menggunakan platform pembelajaran digital karena keterbatasan infrastruktur di sekolah.

Menurut teori implementasi George Edward III, kebijakan yang diterapkan tanpa sumber daya yang memadai dapat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyediakan fasilitas pendukung, seperti jaringan internet yang lebih stabil, perangkat pembelajaran digital, serta pelatihan teknologi bagi guru agar mereka lebih siap dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi.

3. Disposisi dalam Implementasi Merdeka Belajar

Disposisi atau sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu program. Berdasarkan wawancara dengan guru dan siswa di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu, ditemukan bahwa guru memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan kebijakan Merdeka Belajar. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang lebih

interaktif dan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, serta metode inovatif lainnya.

Namun, tantangan muncul dari kesiapan siswa dalam belajar secara mandiri. Banyak siswa yang masih terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional dan mengalami kesulitan dalam mengelola waktu serta mencari sumber belajar secara mandiri. Beberapa siswa merasa bahwa kebebasan dalam belajar justru membuat mereka kurang disiplin, karena mereka masih membutuhkan struktur pembelajaran yang lebih jelas dan bimbingan yang lebih intensif dari guru.

Menurut George Edward III, disposisi yang lemah dari penerima kebijakan dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam membimbing siswa, seperti melalui program pendampingan akademik, bimbingan belajar, atau integrasi metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran mandiri dengan arahan dari guru.

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Merdeka Belajar

Struktur birokrasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai prosedur. SMA Negeri 1 Kualuh Hulu telah menjalankan program sesuai dengan ketentuan dalam Kepmendikbud Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak (Mendikbud, 2020), di mana setiap guru dan staf memiliki tanggung jawab yang jelas dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu, sekolah juga telah melakukan pelaporan secara berkala mengenai perkembangan program Merdeka Belajar kepada dinas pendidikan setempat.

Namun, kelemahan dalam sistem monitoring dan evaluasi masih menjadi kendala. Tidak adanya mekanisme evaluasi yang komprehensif menyebabkan sulitnya mengukur sejauh mana kebijakan ini berdampak terhadap kualitas belajar siswa. Dalam teori implementasi kebijakan, George Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kaku atau kurangnya mekanisme evaluasi dapat menghambat keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur, seperti penyusunan indikator keberhasilan yang lebih jelas, agar sekolah dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan Merdeka Belajar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kualuh Hulu telah menunjukkan perubahan dalam sistem pembelajaran, khususnya dalam pergeseran dari metode konvensional menuju pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan siswa berjalan dengan baik, yang mendukung pemahaman terhadap kebijakan ini. Guru memiliki motivasi tinggi dalam menerapkan metode pengajaran yang lebih inovatif, sementara siswa mulai didorong untuk belajar secara mandiri. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas teknologi, kurangnya kesiapan sebagian siswa dalam belajar mandiri, serta perlunya peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis Merdeka Belajar.

Dalam perspektif teori George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun SMA Negeri 1 Kualuh Hulu telah menunjukkan kemajuan dalam aspek komunikasi dan disposisi pelaksana, hambatan dalam sumber daya dan sistem evaluasi masih perlu diperbaiki agar implementasi kebijakan lebih optimal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam penyediaan fasilitas digital, pelatihan guru, serta penguatan mekanisme evaluasi dan monitoring agar kebijakan Merdeka Belajar benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar." *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9>



Anwar, A. S. (2020). Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru Pada Satuan Pendidikan Mts Negeri 1 Serang. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 147–173. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.79>

Bhakti, Y. B., Simorangkir, M. R. R., Tjalla, A., & Sutisna, A. (2022). Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), 783–790.

Haqkiki, E., Rochayati, R., & Ilhaq, M. (2022). Penerapan Model Cooperative Learning terhadap Karakter Kerjasama Siswa pada Pembelajaran Seni Tari. *Jurnal Pendidikan Dan Penciptaan Seni*, 2(1), 47–55.

Ilmawan, D. (2024a). Implementasi Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 820–828. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10546>

Ilmawan, D. (2024b). Implementasi Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 820–828. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10546>

Inayati, I., Isnaini, I., & Siregar, N. S. S. (2023). Analisis Peningkatan Kualitas Guru pada UPT (Unit Pelayanan Terpadu) SMP Negeri 7 Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2809–2823. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1724>

Joko Widodo. (2021). Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.

Khairat. (2016). Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada Materi Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 80–87.

Lase, S., Simbolon, E. T., Simbolon, J. W., Firmando, H. B., Lumbantobing, R., & Panjaitan, A. P. A. (2022). Pengembangan Kurikulum Sosiologi Agama sebagai Model dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar bagi Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2220–2233. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1039>

Lubis, A. R. A., Hasanuddin, H., & Lubis, S. (2022). Hubungan Gaya Belajar dan Motivasi Belajar dengan Minat Belajar Siswa di UPT SMP Negeri 1 Silahisabungan Kabupaten Dairi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2172–2180. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1027>

Mendikbud. (2020). Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 1177/M/2020 tentang program sekolah penggerak. In *Kemdikbud*. Kemendikbud RI. <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/kepmendikbud-no-1177-m-2020/>

Musfah, J. (2012). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar : Teori dan Praktik*. Kencana.

Ningtyas, S. I. (2023). Penggunaan Board Game Sebagai Media Pembelajaran Untuk Melatih Berpikir Kreatif Siswa. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 871–880. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19392>

Rohidi, R. (1984). Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1, 2.

Rohman, A., & Ningsih, Y. E. (2018). Pendidikan Multikultural : Penguatan Identitas Nasional Di Era Revolusi Industri 4.0. In *Seminar Nasional Multidisiplin UNWAHA Jombang* (Vol. 1, Issue September).

Sinaga, A., & Zainnudin. (2013). Persepsi dan Implementasi Kebijakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Pembelajaran dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada SMA Negeri Kota Pematang Siantar. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 17–44. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/192/145>

Suryaningsih, S., & Nurlita, R. (2021). Pentingnya Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Inovatif dalam Proses Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(7), 1256–1268. <https://doi.org/10.59141/JAPENDI.V2I07.233>

Werdiningsih, W. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Melaksanakan Pembelajaran Daring. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 113–124. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i1.48>

Yunaini, N., Rukiyati, R., Prabowo, M., Hassan, N. M., & Hermansyah, A. K. (2022). The Concept of the Independent Learning Curriculum (Merdeka Belajar) in Elementary Schools in View of Progressivism Educational Philosophy. *JIP Jurnal Ilmiah PGMI*, 8(2), 95–105. <https://doi.org/10.19109/jip.v8i2.14962>

